

# Proses Peningkatan Pendidikan Berkelanjutan Sebagai Upaya Perbaikan Mutu Pendidikan Nasional<sup>1</sup>

Moh. Adam Jerusalem, S.T., S.H.  
Fakultas Teknik – Universitas Negeri Yogyakarta  
[melasurej12@yahoo.com](mailto:melasurej12@yahoo.com)

## **Abstrak**

Sudah lebih dari 5 tahun krisis melanda Indonesia. Meski ada pertanda perbaikan kondisi, namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga terkena krisis, perbaikan di Indonesia ini terasa sangat lambat bahkan terasa sangat sulit keluar dari krisis. Kesalahan pemerintah masa lalu, dimana pembangunan hanya ditekankan pada pembangunan bersifat fisik dan mengabaikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), telah memberikan konsekuensinya. Indonesia lebih sulit untuk keluar dari krisis dibandingkan negara lain.

Dari berbagai studi menempatkan Indonesia pada kelompok peringkat paling bawah diantara negara-negara dalam hal pengembangan SDM dan kualitas pendidikan. Karenanya tidak ada kata lain selain melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional. Perbaikan sistem pendidikan nasional ini dapat dilakukan dengan cara identifikasi permasalahan mutu pendidikan. Berbagai permasalahan yang terdapat dalam pendidikan nasional antara lain pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi. Faktor lain yang perlu pemecahannya adalah faktor tenaga pengajar, siswa, anggaran pendidikan dan fasilitasnya serta kurikulum. Berbagai pendekatan telah diusulkan untuk perbaikan sistem pendidikan, salah satunya berdasarkan konsep sistem industri modern.

**Kata Kunci : Mutu, Pendidikan, Perbaikan terus-menerus.**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Berdasar data dari UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia semakin menurun. Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 tahun 1997, ke-105 tahun 1998, dan ke-109 tahun 1999. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant*

---

<sup>1</sup> Dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Etika, Univ Soegijopranoto, 2005

(PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia dengan posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum*, Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara dan berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Pada bagian lain terdapat fenomena menarik berkaitan dengan lulusan perguruan tinggi di Indonesia, yaitu ketidakmampuan lulusan itu untuk cepat beradaptasi dengan kebutuhan dunia industri modern. Hal ini berakibat pada tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat, sebaliknya tenaga-tenaga kerja asing yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri terus berdatangan ke Indonesia untuk memasuki pasar tenaga kerja di Indonesia. Menurut Vincent Gasperz, hal tersebut disebabkan oleh terjadinya kesenjangan persepsi antara pengelola perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusannya dan pengelola industri untuk menggunakan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

### **Permasalahan**

Dari pemaparan diatas, cukup menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Secara internasional, pendidikan Indonesia sangat tidak kompetitif dengan negara-negara sedunia. Sementara secara nasional mutu pendidikanpun memprihatinkan salah satunya ditandai dengan mutu lulusan. Permasalahan dalam pendidikan Indonesia adalah identifikasi mutu dan permasalahannya serta solusinya.

### **PEMBAHASAN**

Pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, sehingga bangsa ini tidak hanya berkuat pada posisi kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi. Banyak ahli telah mengungkapkan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya melalui pendidikan. Robert M. Solow pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 1987 menekankan peranan ilmu pengetahuan dan investasi sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dan dari teori Solow yang

kemudian dikembangkan menjadi teori baru pertumbuhan ekonomi (*The New Growth Theory*) tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan dasar pertumbuhan ekonomi.

Menurut Umaedi (1999) terdapat dua faktor yang menghambat upaya perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Pertama, strategi pembangunan pendidikan lebih bersifat *input oriented*. Strategi ini berdasar pada bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan menghasilkan output (lulusan) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh *teori education production function* tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak berjalan di tingkat mikro (sekolah).

Buruknya kondisi pendidikan ini memunculkan usulan pembaharuan sistem pendidikan nasional. Dalam pandangan Dody Heriawan terdapat empat permasalahan yang perlu segera dibenahi. Masalah pertama adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Binbaga) Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa).

Masalah kedua adalah rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%.

Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

Masalah ketiga adalah rendahnya mutu pendidikan. Indikator rendahnya mutu pendidikan nasional dapat dilihat pada prestasi siswa. Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (*Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement*) di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia). Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi *The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999* (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah *Asia Week* dari 77 universitas yang disurvei di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.

Masalah keempat yang dihadapi adalah masih rendahnya efisiensi pendidikan nasional. Rendahnya efisiensi pengelolaan pendidikan dapat dilihat dari : penyebaran guru yang tidak merata, terjadinya putus sekolah di semua jenjang pendidikan, bangunan fisik gedung sekolah yang cepat rusak dalam waktu yang pendek, jam belajar yang tidak efektif dan optimal, dan pengalokasian dana pendidikan yang tidak fleksibel.

Rendahnya mutu pendidikan Indonesia terkait dengan kualitas guru/tenaga pengajar yang masih rendah juga. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan keatas.

Dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan keatas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3). Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas karena tenaga pengajar mempunyai peran sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Disamping faktor kualitas guru/tenaga pengajar, siswa atau mahasiswa Indonesia juga menjadi bagian dari rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Rata-rata mahasiswa Indonesia belajar setiap harinya hanya berkisar antara 1-2 jam/hari. Sedangkan di Eropa, Amerika atau Malaysia, rata-rata mahasiswanya belajar antara 6-12 jam/hari.

Hal lain yang menjadi faktor buruknya mutu pendidikan di Indonesia adalah kecilnya anggaran pendidikan. Tidak terbantahkan bahwa rendahnya kualitas SDM merupakan konsekuensi dari terabaikannya sektor pendidikan dalam pembangunan. Ini terlihat dari rendahnya proporsi APBN untuk sektor pendidikan. Sampai tahun 2000 pengalokasian anggaran pendidikan hanya sebesar 6,3 persen dari APBN, jauh lebih rendah dari Korea, Thailand, Malaysia, dan Singapura yang menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN masing-masing. Padahal berdasarkan penilaian KKT Pembangunan Sosial di Kopenhagen pada 1995 menganjurkan agar anggaran sebesar 20 persen dari total APBN digunakan untuk pembangunan sosial serta 15 persen untuk pendidikan. Sementara UNESCO menyarankan agar anggaran sektor pendidikan minimal 4 persen dari GDP. Permasalahan masih ditambah lagi dengan minimnya fasilitas pendidikan yang memadai.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi mutu pendidikan nasional adalah kurikulum. Disamping adanya kesenjangan persepsi antara pengelola perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusannya dan pengelola industri untuk menggunakan lulusan perguruan tinggi di Indonesia, kurikulum yang ada selama ini dianggap tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan lapangan kerja. Akibatnya adalah ketidakmampuan lulusan

untuk cepat beradaptasi dengan kebutuhan dunia industri modern. Kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri di Indonesia seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Kesenjangan Lulusan PT dengan Kebutuhan Industri di Indonesia

Lulusan Perguruan Tinggi	Kebutuhan Industri
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya memahami teori</li> <li>2. Memiliki ketrampilan individual</li> <li>3. Motivasi belajar hanya untuk lulus ujian</li> <li>4. Hanya berorientasi pada pencapaian grade atau nilai tertentu (pembatasan target)</li> <li>5. Orientasi belajar hanya pada mata kuliah individual secara terpisah</li> <li>6. Proses belajar bersifat pasif, hanya menerima informasi dari dosen</li> <li>7. penggunaan teknologi (misal komputer) terpisah dari proses belajar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan solusi masalah berdasar konsep ilmiah</li> <li>2. memiliki team work</li> <li>3. mempelajari bagaimana belajar yang efektif</li> <li>4. Berorientasi pada peningkatan terus menerus</li> <li>5. membutuhkan pengetahuan terintegrasi untuk solusi masalah yang komplek</li> <li>6. Bekerja adalah suatu proses interaksi dengan orang lain dan memproses informasi secara aktif</li> <li>7. Penggunaan teknologi merupakan bagian integral dari prsoses pembelajaran untuk soludi maslah industri.</li> </ol>

Sumber : Penerapan TQME di Indonesia (Vincent Gasperz)

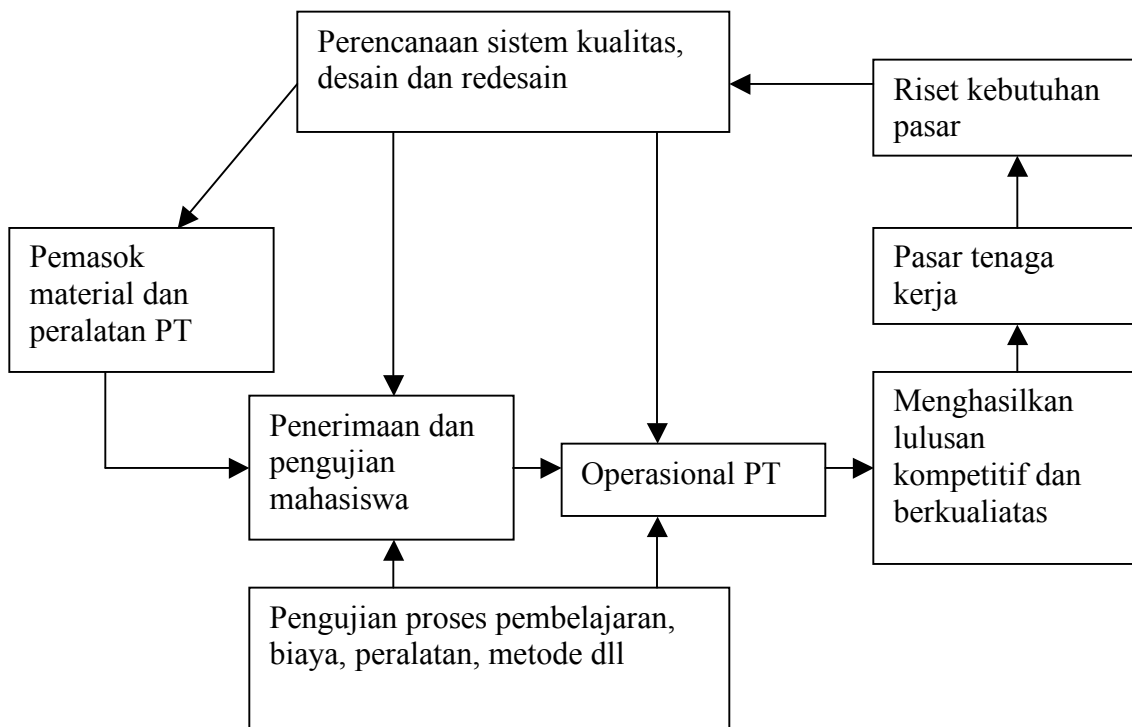
## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada identifikasi mutu pendidikan dan permasalahannya, maka dapat diajukan suatu solusi untuk memajukan sistem pendidikan nasional. Engkoswara berpendapat ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan Indonesia. Pertama adalah revitalisasi budaya bangsa. Artinya bangsa ini harus kembali berpedoman kepada Pembukaan UUD 1945, bahwa pendidikan adalah upaya utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya, yang beriman kepada Tuhan YME, memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki kreativitas pribadi yang terpuji. Hal kedua adalah, manajemen pendidikan. Implementasi sistem pendidikan nasional yang telah disahkan harus dilakukan dengan manajemen atau pengelolaan yang proporsional dan profesional, baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro.

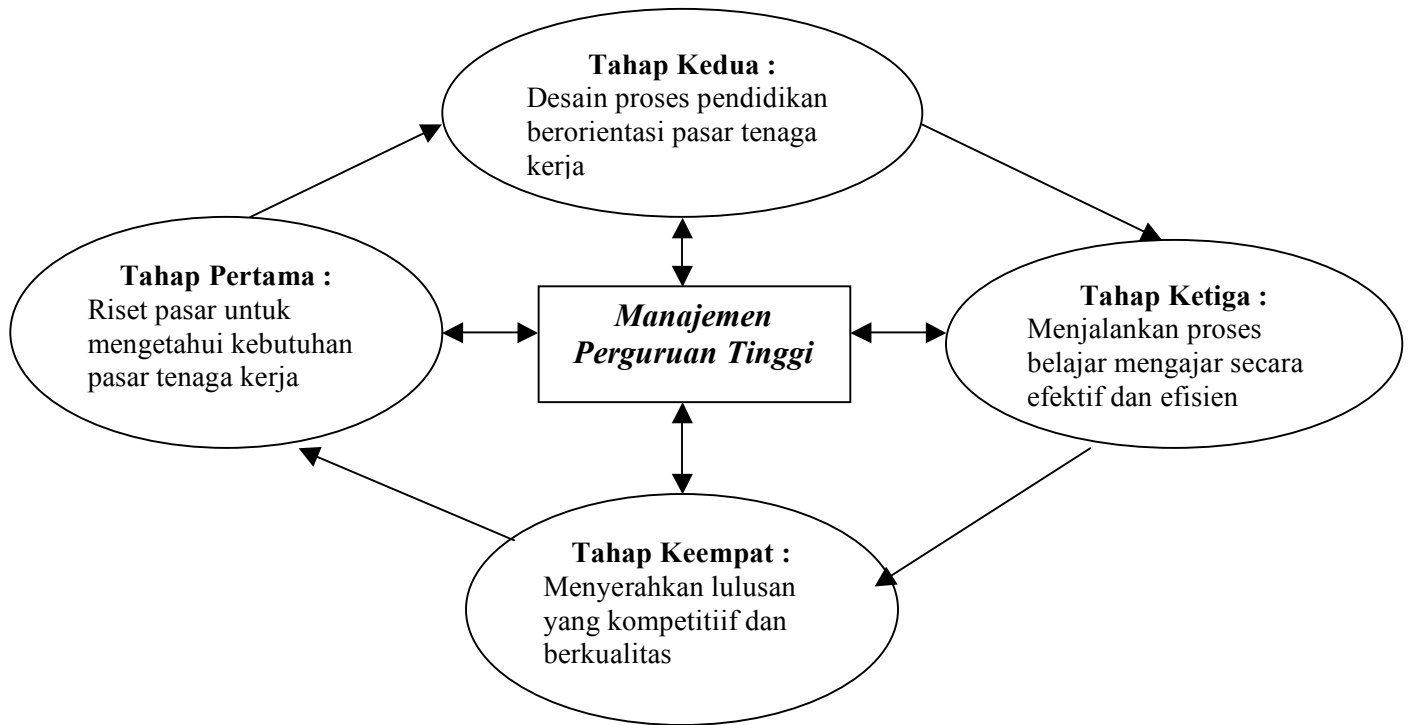
Upaya untuk perbaikan sistem pendidikan nasional juga dapat didasarkan pada manajemen sistem industri. Berdasar pada konsep berpikir manajemen sistem industri

modern, maka manajemen perguruan tinggi di Indonesia sudah seharusnya memandang bahwa proses pendidikan adalah suatu peningkatan terus-menerus yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan lulusan (output) yang berkualitas, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran dan ikut bertanggung jawab untuk memuaskan pengguna lulusan perguruan tinggi itu. Seterusnya, berdasarkan informasi sebagai umpan balik yang dikumpulkan dari pengguna lulusan (*external customers*) itu dapat dikembangkan ide-ide kreatif untuk mendisain ulang kurikulum atau memperbaiki proses pendidikan tinggi yang ada saat ini. Konsep pemikiran manajemen sistem pendidikan tinggi dapat dituangkan pada gambar 1.



Gambar 1. Manajemen Sistem Pendidikan Tinggi Modern

Selanjutnya dapat dikembangkan pula model manajemen operasional perguruan tinggi di Indonesia seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Roda Deming dalam Manajemen Pendidikan Tinggi Modern

Pada gambar 2. menunjukkan bahwa penerapan roda Deming dalam manajemen pendidikan tinggi di Indonesia akan terdiri dari empat komponen utama, yaitu riset pasar tenaga kerja, desain proses pendidikan tinggi, operasional proses pendidikan tinggi dan penyerahan lulusan yang kompetitif dan berkualitas ke pasar tenaga kerja. Dalam hal ini diperlukan suatu interaksi tetap antara riset pasar tenaga kerja, desain proses pendidikan tinggi, operasional proses pendidikan tinggi dan bertanggung jawab menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berkualitas ke pasar tenaga kerja, agar perguruan tinggi di Indonesia mampu berkompetisi di dalam era persaingan global. Berkaitan dengan hal ini, sudah saatnya perguruan tinggi di Indonesia melakukan reorientasi dan redefinisi tujuan dari pendidikan tinggi, bukan sekedar menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya tanpa peduli akan kepuasan pengguna lulusan itu, melainkan juga harus bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berkualitas agar memuaskan kebutuhan pengguna tenaga kerja terampil berpendidikan tinggi. Melalui penerapan roda Deming



dalam sistem pendidikan tinggi yang dijalankan secara konsisten, maka perguruan tinggi Indonesia bukan tidak mustahil akan mampu memenangkan persaingan global yang amat kompetitif dan memperoleh manfaat (ekonomis maupun non ekonomis) yang dapat dipergunakan untuk pengembangan perguruan tinggi itu dan peningkatan kesejahteraan pegawai yang terlibat di perguruan tinggi itu.

## **Saran**

Berbagai permasalahan ada dalam sistem pendidikan nasional. Permasalahan inipun semakin bervariasi karena banyaknya pendapat dan penelitian yang ada. Demikian juga dengan bermacam-macam solusi yang ditawarkan. Hal itu merupakan suatu awal yang bagus dalam rangka untuk memperbaiki pendidikan nasional bangsa demi menjaga ketahanan bangsa. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah kesadaran bangsa Indonesia untuk melakukan perbaikan sistem pendidikan secara terus-menerus sebagaimana konsep sistem mutu dalam industri modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dody Heriawan Priatmoko, *Reformasi Pendidikan Indonesia, Suatu Solusi Keluar Krisis*, [www.edents.bravepages.com/edents online baru/laput dody.htm](http://www.edents.bravepages.com/edents_online_baru/laput_dody.htm) - 38k –
- Moh Adam Jerusalem, 2005, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Fashion Yang Memenuhi Kualifikasi Industri Melalui Perguruan Tinggi*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Produk Fashion dan SDM, Prodi Teknik Busana, UNY, Yogyakarta.
- Pikiran Rakyat, 22 Mei 2004, *Mutu Pendidikan Masih Rendah, Belum Mampu Mendukung Kualitas Bangsa Yang Terpuruk*, Bandung.
- Umaedi, 1999, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu*, Jakarta.
- Vincent Gasperz, *Penerapan Total Quality Management in Education pada Perguruan Tinggi di Indonesia : Suatu Upaya untuk Memenuhi Kebutuhan Sistem Industri Modern*, [www.depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id) .